

PERTEMUAN PANCASILA DAN AGAMA DALAM TINJAUAN NILAI

Moh. Dey Prayogo

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
deyprayogo@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian dan perbedaan antara nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama yang hidup di Indonesia. Sejarah mencatat hubungan agama dan pancasila selalu menjadi pembahasan panjang dalam mengupas dialektika keduanya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk menganalisis titik temu antara prinsip dasar Pancasila dengan nilai-nilai transendental dan etika agama-agama besar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila dan agama memiliki hubungan yang harmonis dalam aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, sebagai modal utama untuk menjaga keberlangsungan peradaban bangsa Indonesia dalam kebhinekaan dan pluralitas.

Kata kunci: *Pancasila, agama, nilai, etika, kehidupan berbangsa*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdiri di atas dasar Pancasila, sebuah fondasi ideologis yang memuat nilai-nilai fundamental bagi kehidupan bersama dalam masyarakat yang majemuk. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi panduan moral dan etika dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana ditegaskan oleh Notonagoro (1975), Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mengandung nilai-nilai objektif dan universal, yang bersumber dari budaya, sejarah, dan agama-agama yang hidup dan tumbuh berdasarkan dinamika realitas di Indonesia (Safitri, 2021).

Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga hidup dalam keberagaman agama yang kaya akan ajaran normatif dan nilai-nilai transendental. Negara secara resmi mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang semuanya memiliki ajaran moral dan etika yang menjadi pedoman hidup para pemeluknya. Agama dalam konteks bangsa Indonesia bukan hanya soal spiritualitas individu, tetapi juga memainkan peran penting dalam struktur sosial dan dinamika politik yang berkembang selama ini.

Keberadaan agama dan Pancasila sebagai dua pilar utama kehidupan sosial di Indonesia menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berinteraksi dengan nilai-nilai agama? Apakah keduanya bersifat selaras dan saling memperkuat, atau terdapat kontradiksi normatif yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial? Pertanyaan ini relevan mengingat adanya sejumlah peristiwa dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan potensi disharmoni antara tafsir keagamaan dan prinsip-prinsip kebangsaan, seperti isu pluralisme, toleransi antarumat beragama, dan penegakan hukum berbasis agama, serta isu-isu lainnya.

Ketegangan antara nilai-nilai agama dan Pancasila seringkali muncul bukan karena pertentangan substansial, tetapi lebih karena perbedaan tafsir dan kepentingan politik yang menyertainya. Oleh karena itu, penting untuk mendekati isu ini secara hati-hati dan reflektif, dengan mempertimbangkan dimensi historis, filosofis, dan sosiologis yang melatarbelakanginya (Mujiburrahman, 2006).

Salah satu momen historis penting yang menandai ketegangan antara agama dan Pancasila adalah perdebatan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945. Perdebatan tersebut mencuat saat pembahasan tentang dasar negara, khususnya mengenai rumusan sila pertama. Usulan Piagam Jakarta yang memuat frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menimbulkan keberatan dari sebagian tokoh Kristen dan dari kawasan Indonesia timur. Akhirnya, frasa tersebut dihapus demi menjaga persatuan nasional dan diterima sebagai kompromi politik antara kelompok Islam dan nasionalis (Boland, 1970).

Ketegangan serupa muncul kembali dalam wacana penerapan syariat Islam di beberapa daerah pasca era Reformasi. Beberapa pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yang kemudian memicu kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip universal Pancasila dan UUD 1945, serta berpotensi mendiskriminasi kelompok agama minoritas. Fenomena ini mencerminkan bagaimana otonomi daerah dapat menjadi arena kontestasi nilai antara tafsir agama dan ideologi negara. Di era Orde Baru, ketegangan ini meredup secara formal karena kuatnya kontrol negara terhadap ekspresi keagamaan dan ideologi politik. Namun, hubungan antara agama dan Pancasila tetap menjadi isu yang sensitif. Pemerintahan Soeharto menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berorganisasi dan berpolitik melalui kebijakan asas tunggal, yang menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk kelompok Islam. Meskipun dimaksudkan untuk menjaga stabilitas nasional, kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk pengekan terhadap kebebasan beragama dan berpendapat (Hefner, 2011).

Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif titik temu dan titik perbedaan antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama dari perspektif etika dan moral. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif dengan mengandalkan kajian pustaka sebagai sumber utama. Studi ini akan menelaah sejumlah literatur yang membahas konsep nilai dalam Pancasila, doktrin moral dalam berbagai agama yang diakui di Indonesia, serta wacana akademik mengenai relasi negara dan agama dalam konteks masyarakat plural. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan integrasi nasional serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang sejalan dengan ajaran agama.

B. LANDASAN TEORI

Teori nilai menjadi dasar dalam menganalisis kesamaan dan perbedaan antara Pancasila dan agama. Max Scheler (1973) membedakan antara berbagai tingkatan nilai berdasarkan hierarki objektif yang tidak tergantung pada kehendak atau kepentingan individu. Menurut Scheler, nilai bukanlah hasil konstruksi

subjektif, melainkan entitas yang bersifat apriori dan dapat ditangkap melalui pengalaman emosional (feeling) yang bersifat intuitif (Scheler, 1973). Nilai agama mencakup nilai ketuhanan, moralitas, kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab. Sementara Pancasila sebagai ideologi terbuka mengakomodasi nilai-nilai universal yang juga tercermin dalam doktrin agama. Nilai membentuk dasar bagi manusia dalam memilih, bertindak, dan mengevaluasi kehidupan. Dalam konteks ini, nilai-nilai agama dan Pancasila dapat dianalisis sebagai sistem norma yang mengatur perilaku kolektif dalam masyarakat.

Teori etika normatif menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral digunakan untuk menilai kebaikan dan keburukan suatu tindakan. Dalam etika teologis, prinsip moral berasal dari wahyu Tuhan, sedangkan dalam etika sekuler (seperti yang terkandung dalam Pancasila), prinsip moral dapat berasal dari akal dan pengalaman kolektif manusia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data berasal dari dokumen resmi negara seperti Pembukaan UUD 1945, dokumen BPIP, serta literatur keagamaan dan karya ilmiah dari para teolog dan ahli filsafat Pancasila. Analisis dilakukan secara deduktif dengan mencermati kesesuaian antara nilai-nilai pada masing-masing sistem (Pancasila dan agama).

Sumber data dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen normatif seperti Pembukaan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara, dan naskah-naskah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Selain itu, juga digunakan sumber primer dan sekunder dari literatur keagamaan, buku filsafat, etika, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengklasifikasi informasi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi, menginterpretasi, dan membandingkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan ajaran agama-agama di Indonesia.

Langkah-langkah dalam analisis meliputi: Identifikasi nilai-nilai dasar Pancasila berdasarkan teks resmi dan pemikiran para ahli Pancasila; Identifikasi nilai-nilai etika dan moral dari masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu); Komparasi terhadap nilai-nilai yang sejenis dan analisis terhadap titik temu serta potensi ketegangan antara keduanya; Penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis atas hasil-hasil temuan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang bagaimana Pancasila dan agama berinteraksi dalam membentuk sistem nilai masyarakat Indonesia.

D. PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila mengandung lima sila yang merepresentasikan nilai-nilai dasar yang melandasi kehidupan bermasyarakat: (1) Ketuhanan, (2) Kemanusiaan, (3)

Persatuan, (4) Demokrasi, dan (5) Keadilan Sosial. Kelima sila ini bersifat hierarkis dan saling melengkapi.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai utama dari sila pertama adalah pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai sumber moralitas dan kebenaran. Sila ini mencerminkan nilai spiritualitas, toleransi antarumat beragama, serta kebebasan beragama. Negara menjamin setiap warga untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Nilai ini juga mengandung makna bahwa kehidupan berbangsa harus dibangun atas dasar moral dan etika yang bersumber dari kepercayaan kepada Tuhan.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini mengandung nilai universal tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan martabat setiap individu. Nilai ini juga mencerminkan pentingnya sikap saling menghormati, empati, dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan ras. Dalam nilai ini, terkandung pula prinsip keadilan distributif dan perlakuan yang manusiawi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Persatuan Indonesia. Nilai utama dari sila ketiga adalah nasionalisme dan integrasi bangsa. Nilai ini mengandung semangat untuk memelihara keutuhan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman budaya, etnis, dan agama. Nilai persatuan menuntut kesediaan untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau pribadi serta menjunjung tinggi semangat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini mencerminkan nilai demokrasi, partisipasi rakyat, dan musyawarah mufakat. Dalam sistem ini, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nilai ini juga mengajarkan pentingnya mendahulukan kepentingan bersama melalui diskusi yang bijaksana dan adil, bukan melalui dominasi mayoritas atau kekuasaan otoriter.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila kelima mengandung nilai keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pemerataan pembangunan. Nilai ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan hak-hak dasar dan menikmati hasil pembangunan secara adil. Nilai keadilan sosial mengajak bangsa Indonesia untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan.

Secara keseluruhan, kelima sila Pancasila bukan hanya sekadar rumusan normatif, tetapi merupakan sistem nilai yang membentuk fondasi moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini bersifat universal dan terbuka untuk dijalankan bersama dengan nilai-nilai agama yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia.

Nilai-Nilai dalam Agama

Agama-agama besar di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, mengajarkan nilai-nilai dasar seperti: ketuhanan, moralitas, kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Meskipun ekspresi dan istilahnya berbeda, pada hakikatnya semua agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Islam Islam menekankan nilai ketuhanan (tauhid), keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), musyawarah (shura), dan ukhuwah (persaudaraan). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Pancasila dalam aspek Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Keadilan Sosial.

Kristen dan Katolik Ajaran kasih (agape), pengampunan, keadilan, dan perdamaian sangat ditekankan. Konsep tentang cinta kasih kepada sesama sangat dekat dengan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.

Hindu Menjunjung tinggi dharma (kebenaran dan kewajiban moral), ahimsa (tanpa kekerasan), dan karma (tanggung jawab moral). Nilai-nilai ini senada dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama pada sila kedua dan kelima.

Buddha Ajaran Buddha tentang jalan tengah (Majjhima Patipada), welas asih, dan pengendalian diri mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang dianut Pancasila.

Konghucu Mengutamakan nilai-nilai seperti ren (kasih sayang), yi (kebenaran), li (kesopanan), zhi (kebijaksanaan), dan xin (integritas), yang mendukung semangat Pancasila dalam hal kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai agama pada umumnya mendukung dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Titik temu antara keduanya tampak jelas pada orientasi terhadap keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama.

Titik Temu dan Persamaan

Banyak nilai Pancasila memiliki padanan langsung dalam ajaran agama. Misalnya, Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama berpadanan dengan konsep Tauhid (Islam), Monoteisme (Kristen), Brahman (Hindu), dan sebagainya. Nilai keadilan sosial sejalan dengan ajaran zakat, sedekah, atau filantropi dalam berbagai agama.

Ketuhanan sebagai Landasan Etika Sila pertama Pancasila dan hampir semua agama menempatkan Ketuhanan sebagai dasar moral dan etika. Nilai spiritualitas yang bersumber dari keyakinan kepada Tuhan membentuk kesamaan dalam cara pandang mengenai kebaikan, kebenaran, dan kehidupan bermasyarakat.

Kemanusiaan yang Universal Nilai-nilai tentang kemanusiaan, martabat manusia, kasih sayang, dan keadilan merupakan ajaran pokok dalam semua agama. Ini selaras dengan sila kedua Pancasila yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Agama dan Pancasila sama-sama mengutamakan perlakuan yang adil dan hormat terhadap sesama.

Persatuan dan Solidaritas Sosial Agama-agama mengajarkan pentingnya persaudaraan, solidaritas, dan perdamaian. Demikian pula Pancasila yang dalam sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan Indonesia. Baik agama maupun Pancasila menolak segala bentuk diskriminasi, sektarianisme, dan perpecahan sosial.

Musyawarah dan Demokrasi Nilai-nilai seperti musyawarah (shura dalam Islam, deliberasi dalam etika Kristen) dan penghormatan terhadap pendapat orang lain juga merupakan bagian dari tradisi keagamaan. Ini bersesuaian dengan sila keempat Pancasila mengenai demokrasi yang dijalankan melalui hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

Keadilan Sosial Baik Pancasila maupun agama-agama mengajarkan pentingnya keadilan sosial, keseimbangan, dan kepedulian terhadap kaum lemah. Prinsip ini ditekankan dalam sila kelima dan merupakan titik temu yang sangat penting dalam membangun sistem sosial yang berkeadilan.

Dengan adanya kesamaan nilai-nilai tersebut, dapat dikatakan bahwa Pancasila tidak hanya kompatibel dengan agama, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi umat beragama untuk mengekspresikan ajaran moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbedaan dan Potensi Ketegangan

Perbedaan dapat muncul dalam hal implementasi nilai. Misalnya, Pancasila mendorong pluralisme, sementara sebagian pemeluk agama mungkin memahami kebenaran agamanya secara eksklusif. Ketegangan juga muncul ketika nilai demokrasi bersentuhan dengan sistem otoritas keagamaan. Ketegangan antara Prinsip Sekularisme dan Spiritualitas Pancasila, sebagai ideologi negara, bersifat non-teokratis dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Namun, beberapa kalangan keagamaan menginginkan peran agama yang lebih dominan dalam kehidupan negara. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan beragama dan netralitas negara.

Penafsiran Nilai Moral yang Berbeda Setiap agama memiliki ajaran moral yang spesifik dan terkadang absolut, sementara Pancasila mengadopsi pendekatan inklusif dan kompromistis. Perbedaan ini dapat memunculkan ketegangan dalam penentuan kebijakan publik, seperti dalam isu hukum keluarga, pendidikan moral, dan hak-hak sipil. Ketegangan dalam Praktik Sosial dan Politik Beberapa kelompok keagamaan cenderung eksklusif dan enggan menerima pluralitas nilai. Hal ini bertentangan dengan semangat Pancasila yang menekankan inklusivitas dan persatuan. Ketegangan ini bisa muncul dalam bentuk intoleransi, diskriminasi terhadap minoritas, serta gesekan antara kelompok mayoritas dan minoritas agama.

Perbedaan dalam Tujuan Transendental Agama umumnya mengarah pada keselamatan akhirat dan hubungan vertikal dengan Tuhan, sementara Pancasila lebih fokus pada pembangunan kehidupan sosial dan kebangsaan. Ketegangan bisa muncul ketika tujuan spiritual bertabrakan dengan orientasi kebijakan publik yang pragmatis. Isu Tafsir dan Implementasi Tantangan terbesar bukan pada nilai-nilainya, melainkan pada penafsiran dan implementasi di lapangan. Perbedaan cara menafsirkan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, atau kemanusiaan antara negara dan institusi keagamaan dapat melahirkan konflik normatif maupun praktis. Dengan mengenali perbedaan dan potensi ketegangan ini, diperlukan dialog berkelanjutan antara pemangku kepentingan negara dan agama agar tercipta pemahaman dan kerja sama yang konstruktif.

Implikasi bagi Kehidupan Berbangsa

Pemahaman bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama penting untuk menjaga kohesi sosial. Pancasila memberi ruang bagi ekspresi religius sepanjang tidak merusak nilai persatuan dan keadilan. Dialog antaragama dan penguatan wawasan kebangsaan perlu terus dilakukan untuk mencegah disintegrasi. Penguatan Pendidikan Karakter Nilai-nilai Pancasila dan agama dapat dijadikan sebagai dasar penguatan pendidikan karakter sejak dini.

Pengintegrasian kedua nilai tersebut dalam kurikulum pendidikan nasional akan membantu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Pembentukan Etika Publik Etika publik yang bersumber dari Pancasila dan ajaran agama akan memperkuat integritas dalam kehidupan sosial dan politik. Pemimpin dan aparatur negara dituntut untuk menjadikan nilai ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi Dengan memahami bahwa Pancasila dan agama pada dasarnya tidak saling bertentangan, masyarakat dapat terhindar dari pandangan eksklusif yang berpotensi memicu radikalisme. Penanaman nilai kebangsaan dan keagamaan secara harmonis akan memperkuat imunitas sosial terhadap ideologi yang merusak persatuan. Mendorong Dialog Antaragama dan Antargolongan Pemahaman terhadap titik temu dan perbedaan nilai dapat menjadi dasar bagi terbentuknya ruang-ruang dialog antaragama dan antargolongan. Dialog ini penting untuk membangun sikap saling menghormati dan memperkuat toleransi dalam masyarakat pluralistik.

Perumusan Kebijakan Publik yang Inklusif Nilai-nilai Pancasila dan agama dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan inklusif. Dengan menjadikan moralitas publik sebagai prinsip dasar, kebijakan negara diharapkan mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, sinergi antara Pancasila dan agama tidak hanya berdampak pada aspek ideologis, tetapi juga operasional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang memungkinkan aktualisasi nilai-nilainya secara kontekstual, sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat Pancasila dapat bersinergi dengan nilai-nilai agama, karena ia tidak bersifat dogmatis melainkan inklusif terhadap keragaman keyakinan. Integrasi Nilai Religius dan Nasional Teori integrasi nilai menekankan pentingnya harmoni antara nilai-nilai religius dengan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila dapat diposisikan sebagai ruang bersama tempat berbagai agama mengekspresikan nilai-nilai luhur yang bersifat universal.

E. PENUTUP

Pancasila dan agama memiliki keselarasan nilai yang signifikan dalam membentuk masyarakat Indonesia yang adil, damai, dan beradab. Perbedaan yang muncul lebih kepada cara pandang dan interpretasi, bukan pada esensi nilai. Oleh karena itu, kolaborasi antara negara dan pemuka agama perlu terus dijaga untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat. Nilai pancasila dan agama bertemu dalam lini persatuan dan ketuhanan yang keduanya dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang kolektif, berkemajuan, serta berkeadilan. Penggalan nilai-nilai keselarasan harus terus diupayakan dalam keberlangsungan bangsa Indonesia kedepan sebagai upaya merawat warisan luhur sejarah bangsa dengan corak keragaman sebagai modal konkrit peradaban nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Spranger, E. (1928). *Types of Men: The Psychology and Ethics of Personality*. Halle: Niemeyer.
- Suseno, F. M. (2001). *Etika Dasar*. Jakarta: Gramedia.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Yamin, M. (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca.
- Boland, B. J. (1970). *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. De Nederlandsche Boek-en Steendr.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil islam: Muslims and democratization in indonesia*. Princeton University Press.
- Mujiburrahman. (2006). *Feeling threatened: Muslim-Christian relations in Indonesia's new order* (Vol. 3). Leiden University Press.
- Safitri, R. (2021). Konsep Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *OSF Preprints*, 1–18.
- Scheler, M. (1973). *Formalism in ethics and non-formal ethics of values: A new attempt toward the foundation of an ethical personalism*. Northwestern University Press.